



BUPATI SUMENEP

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena pada tanggal 27 Desember 2022 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan, sehingga pada saat ini Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memiliki pedoman / dasar dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sumenep mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 melalui surat kabar serta website <http://www.sumenep.go.id> dan <http://www.dppka-sumenep.net>

Besar harapan kami semoga dengan publikasi ini dapat menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Sumenep.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sumenep, Desember 2022

BUPATI SUMENEP

TTD

ACHMAD FAUZI, SH, MH.

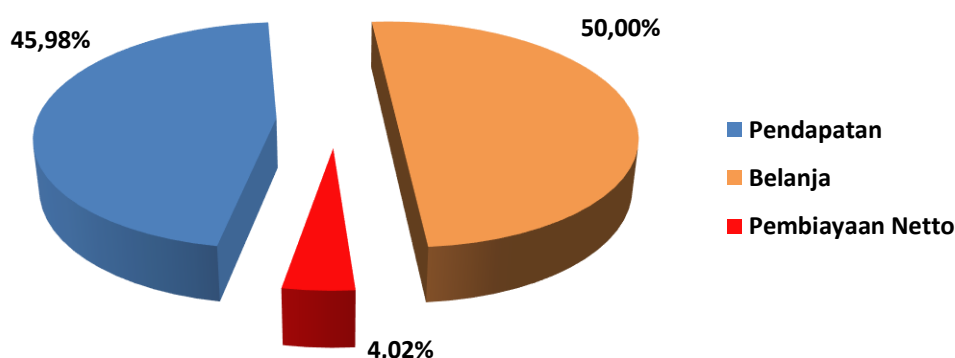
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

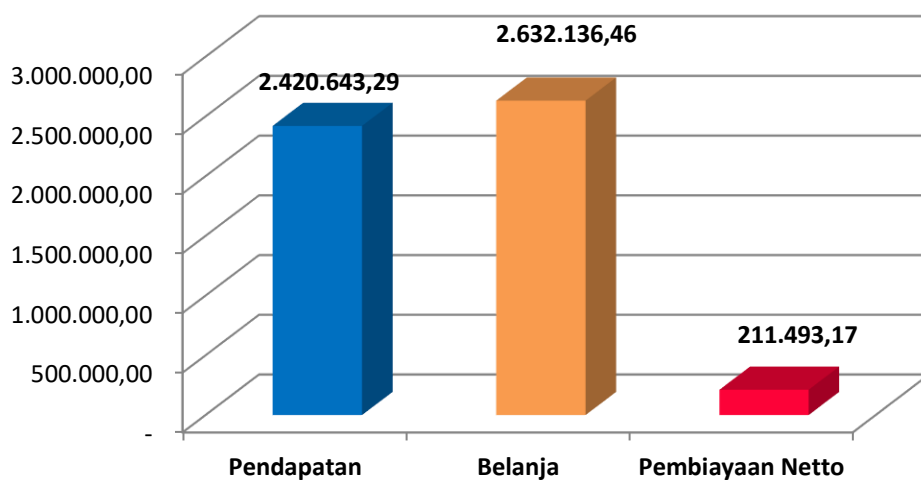
Sebagai Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, maka dalam APBD Tahun Anggaran 2023 tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 101 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022, dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :

**Gambar 1.a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023**



**Gambar 1.b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Dalam jutaan Rupiah)**

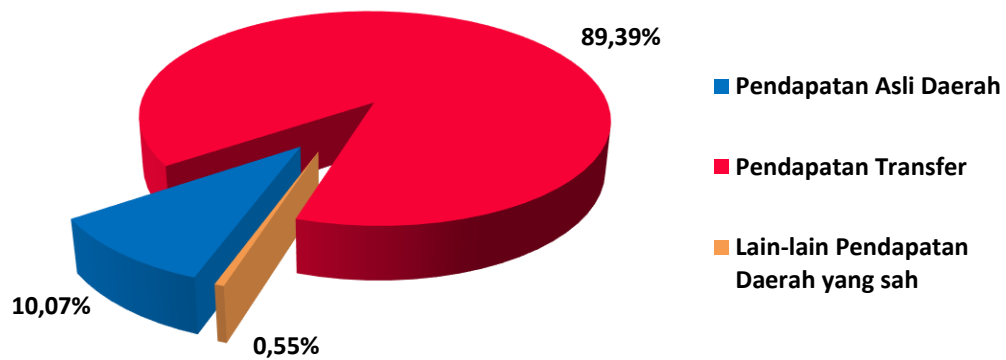


I. PENDAPATAN

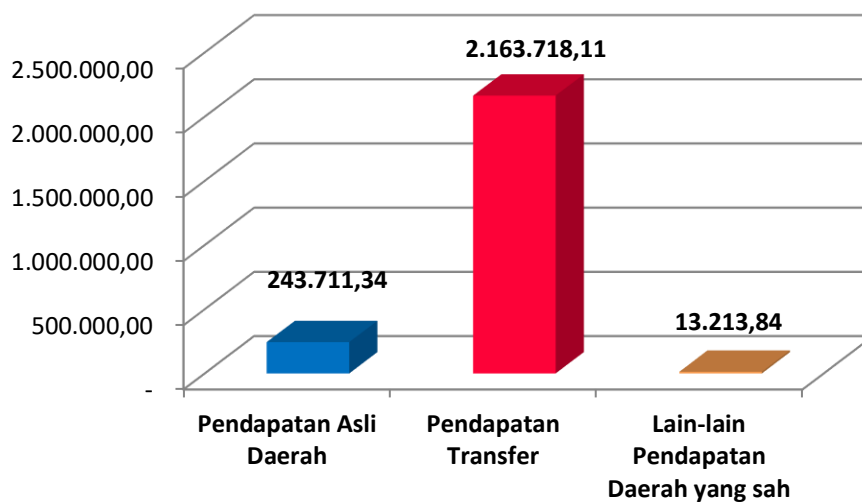
APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 menargetkan Pendapatan sebesar Rp.2.420.643.286.694 yang direncanakan diperoleh dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 243.711.344.026
b. Pendapatan Transfer	Rp. 2.163.718.107.568
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 13.213.835.100
Total Pendapatan	Rp. 2.420.643.286.694

Gambar 2.a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023



Gambar 2.b. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)

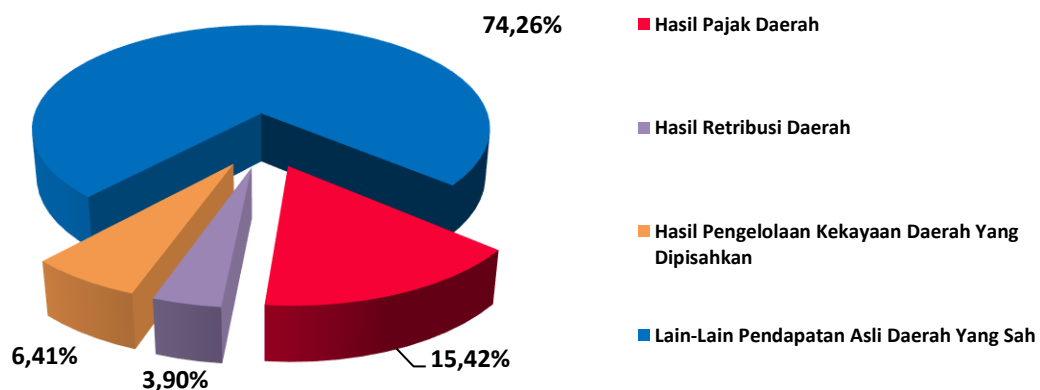


A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

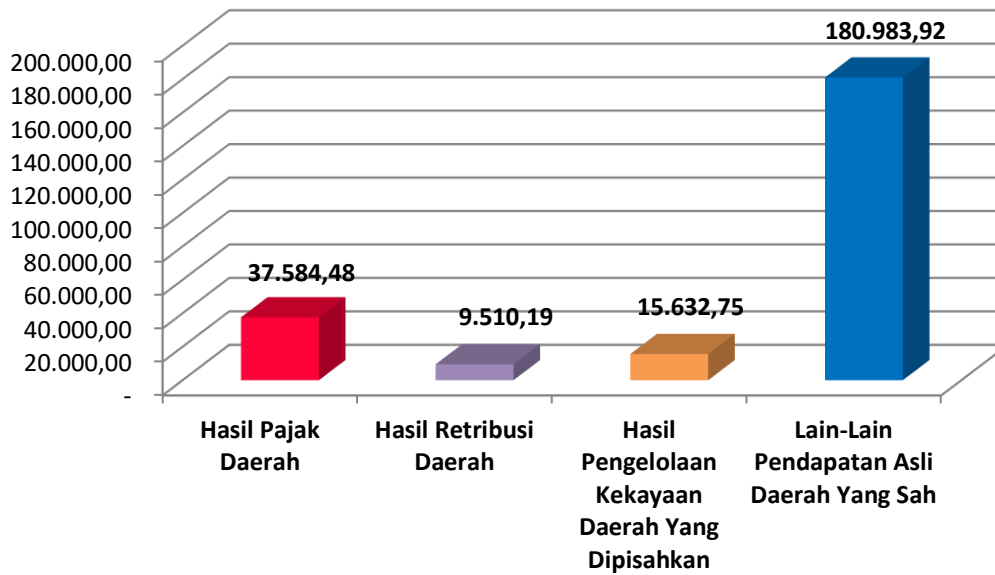
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 243.711.344.026, terdiri dari :

1. Pajak Daerah	Rp.	37.584.478.999
2. Retribusi Daerah	Rp.	9.510.190.730
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.	15.632.750.000
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.	180.983.924.297
Total Pendapatan Asli Daerah	Rp.	243.711.344.026

Gambar 3.a. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023



**Gambar 3.b. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023
(Dalam jutaan Rupiah)**

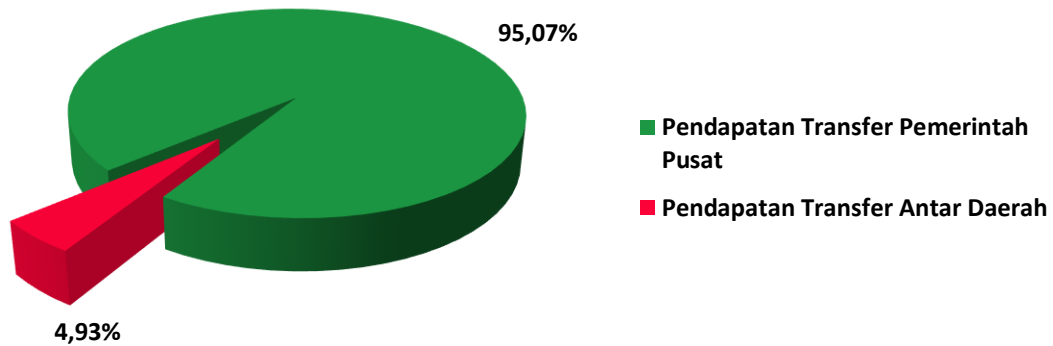


B. PENDAPATAN TRANSFER

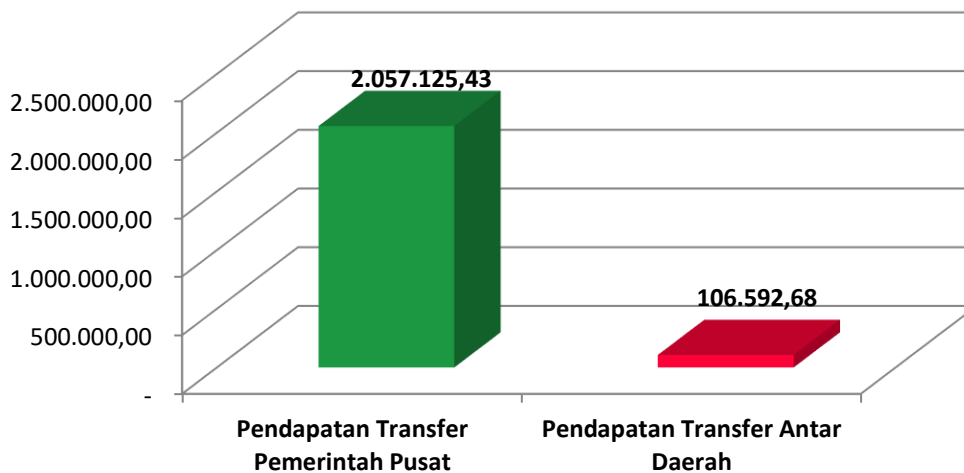
Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 2.163.718.107.568 terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	2.057.125.428.334
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	106.592.679.234
Total Pendapatan Transfer	Rp.	2.163.718.107.568

Gambar 4.a. Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023



**Gambar 4.b. Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023
(Dalam jutaan Rupiah)**

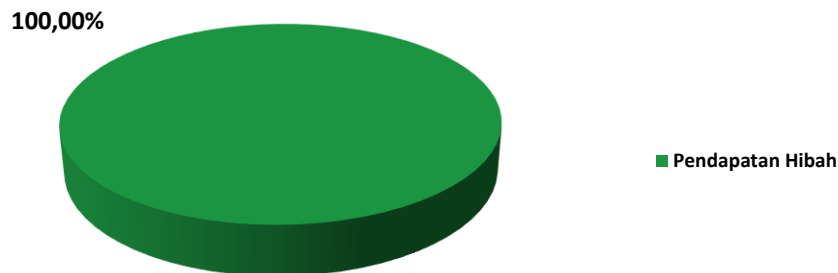


C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

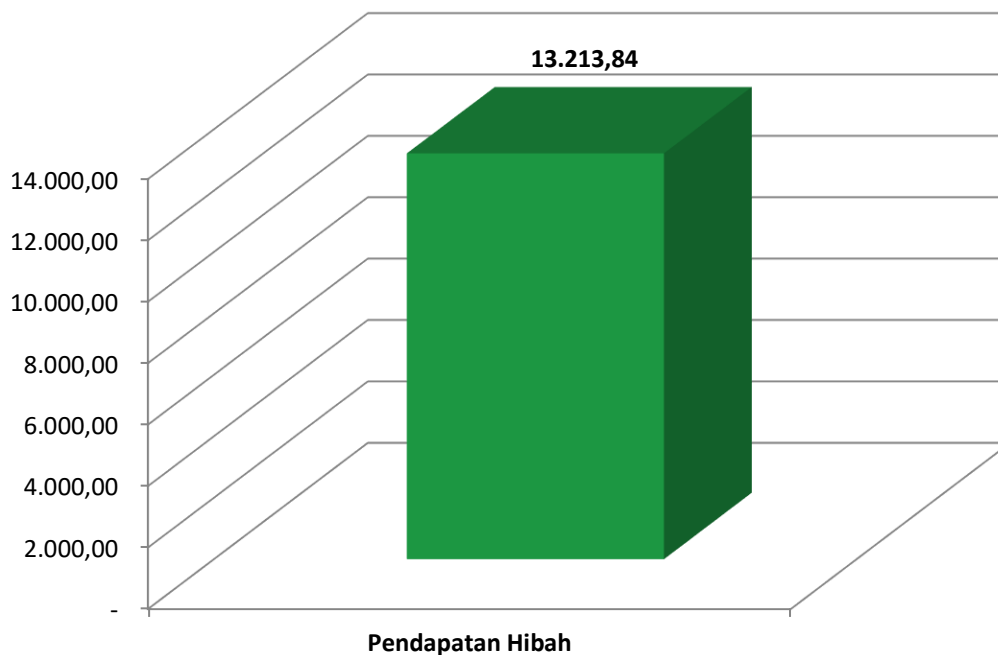
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.13.213.835.100 terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah	Rp. <u>13.213.835.100</u>
Total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 13.213.835.100

Gambar 5.a. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023



Gambar 5.b. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 (Dalam jutaan Rupiah)

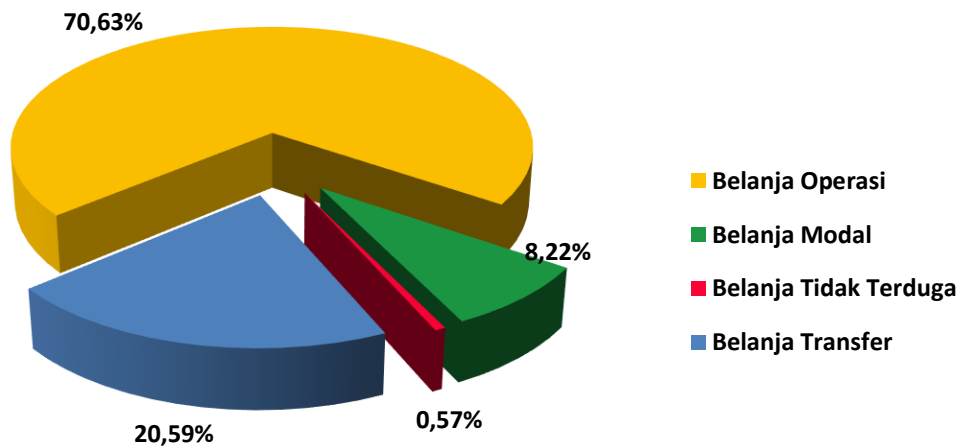


II. BELANJA

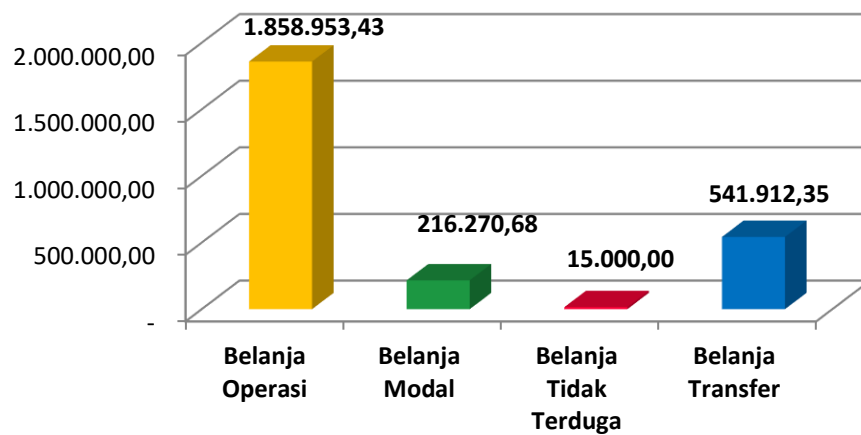
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 menargetkan Belanja sebesar Rp.2.632.136.456.892 yang direncanakan untuk membiayai :

a. Belanja Operasi	Rp. 1.858.953.430.512
b. Belanja Modal	Rp. 216.270.677.950
c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 15.000.000.000
d. Belanja Transfer	Rp. <u>541.912.348.430</u>
Total Belanja	Rp. 2.632.136.456.892

Gambar 6.a. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023



Gambar 6.b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Dalam jutaan Rupiah)

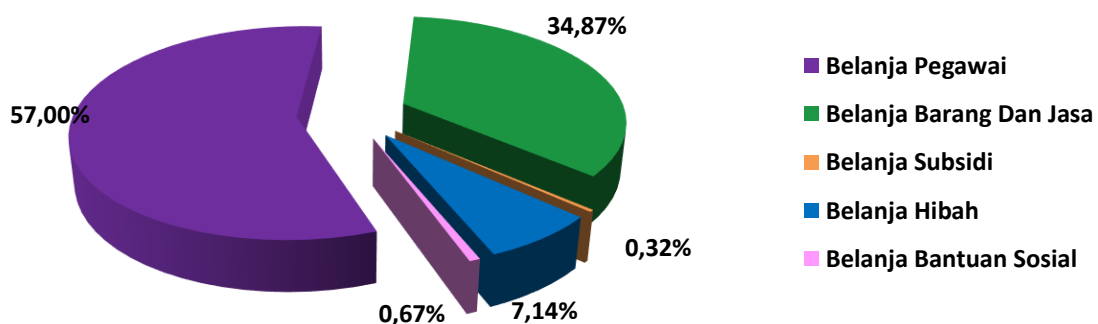


A. BELANJA OPERASI

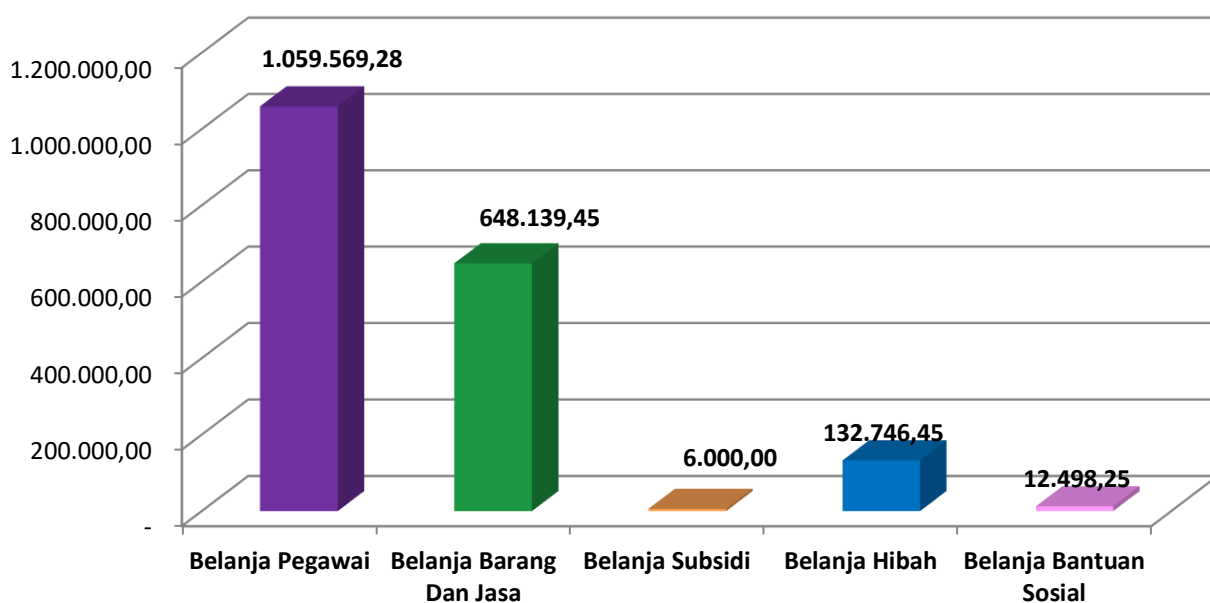
Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.1.858.953.430.512 terdiri dari :

1. Belanja Pegawai	Rp. 1.059.569.280.053
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 648.139.449.230
3. Belanja Subsidi	Rp. 6.000.000.000
4. Belanja Bantuan Hibah	Rp. 132.746.452.229
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 12.498.249.000
Total Belanja Operasi	Rp. 1.858.953.430.512

Gambar 7.a. Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023



**Gambar 7.b. Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023
(Dalam jutaan Rupiah)**

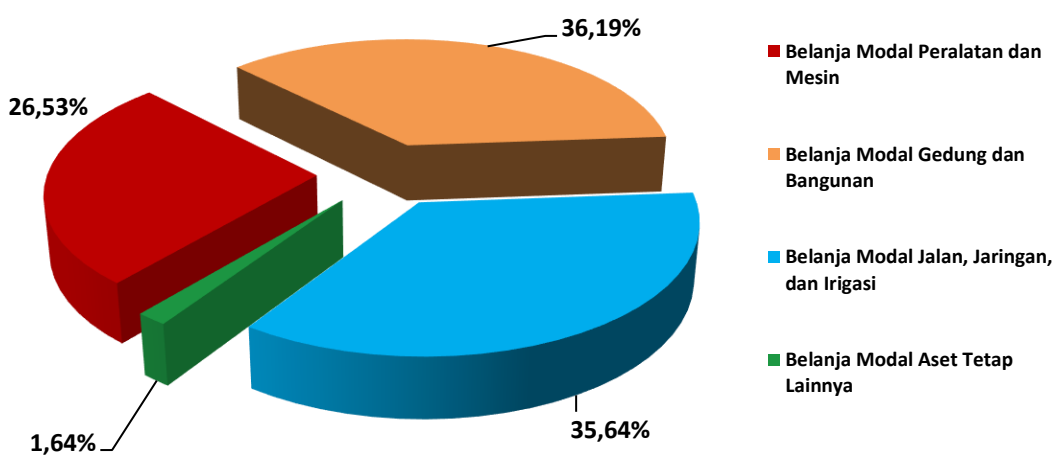


B. BELANJA MODAL

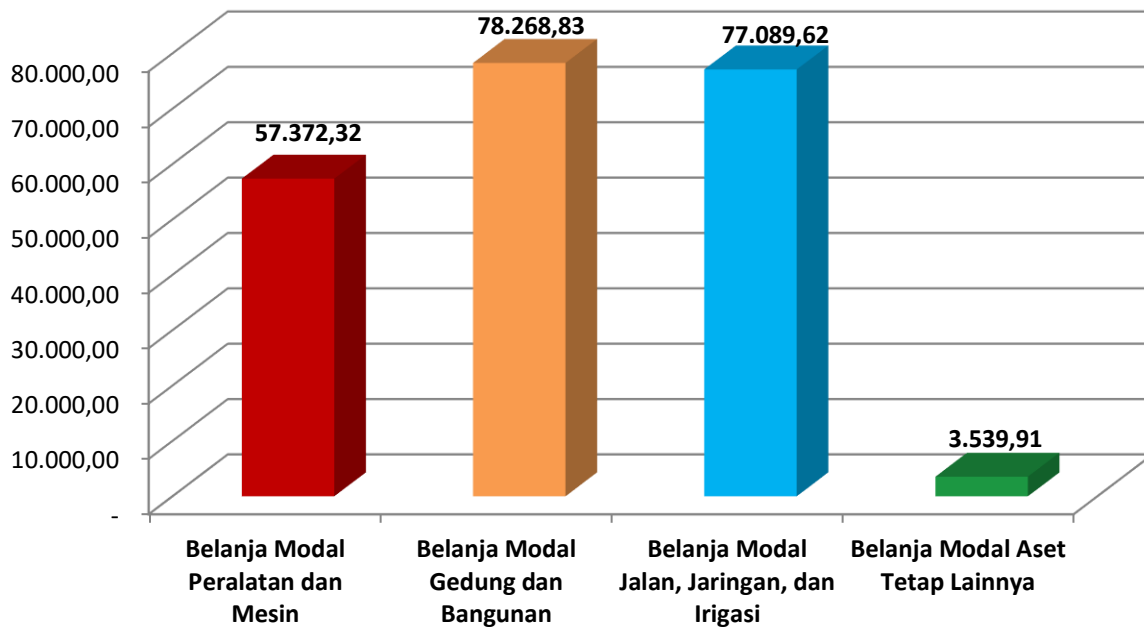
Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.216.270.677.950 terdiri dari :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 57.372.315.595
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 78.268.826.635
3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 77.089.621.720
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	<u>Rp. 3.539.914.000</u>
Total Belanja Modal	Rp. 216.270.677.950

Gambar 8.a. Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2023



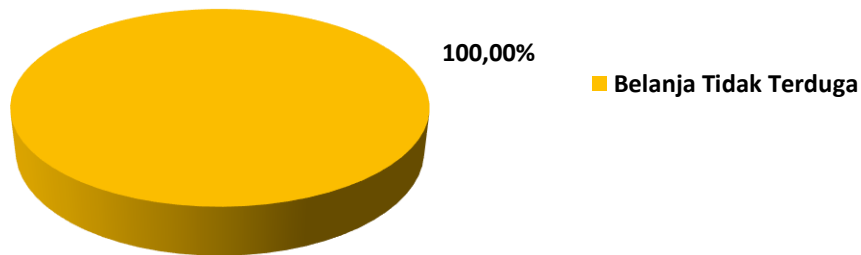
**Gambar 8.b. Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2023
(Dalam jutaan Rupiah)**



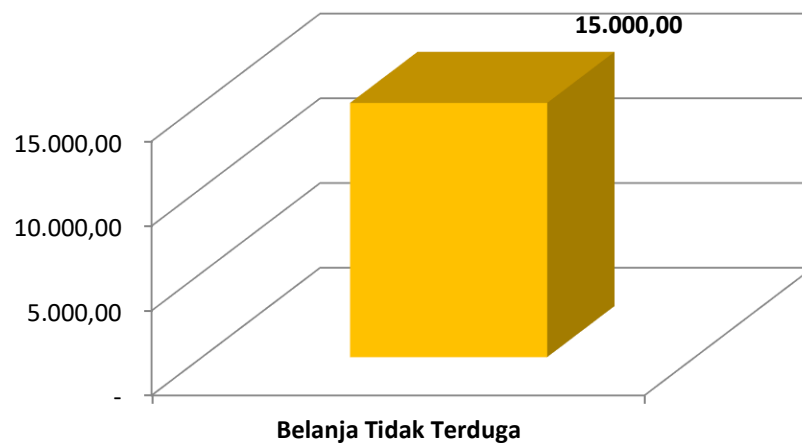
C. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.15.000.000.000,-

Gambar 9.a. Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023



**Gambar 9.b. Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023
(Dalam jutaan Rupiah)**

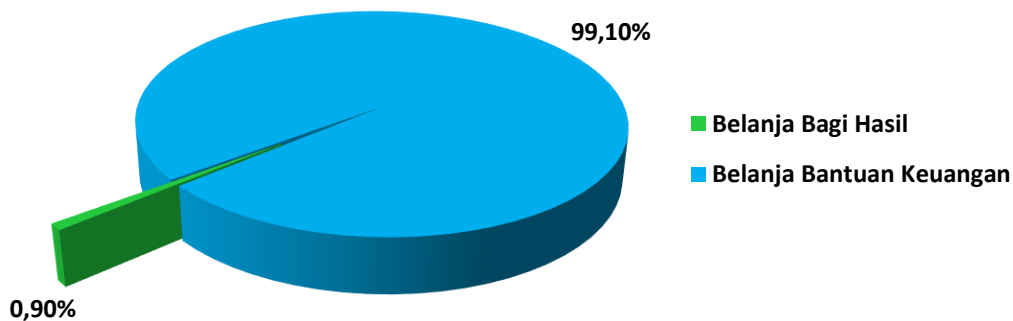


D. BELANJA TRANSFER

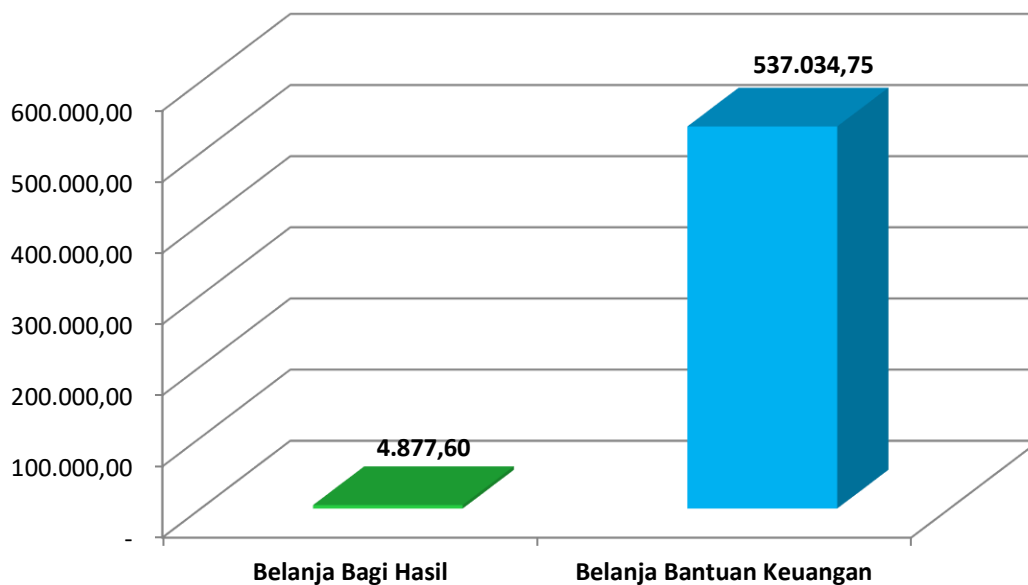
Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.541.912.348.430 terdiri dari :

1. Belanja Bagi Hasil	Rp. 4.877.597.000
2. Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp. 537.034.751.430</u>
Total Belanja Transfer	Rp. 541.912.348.430

Gambar 10.a. Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023



Gambar 10.b. Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 (Dalam jutaan Rupiah)

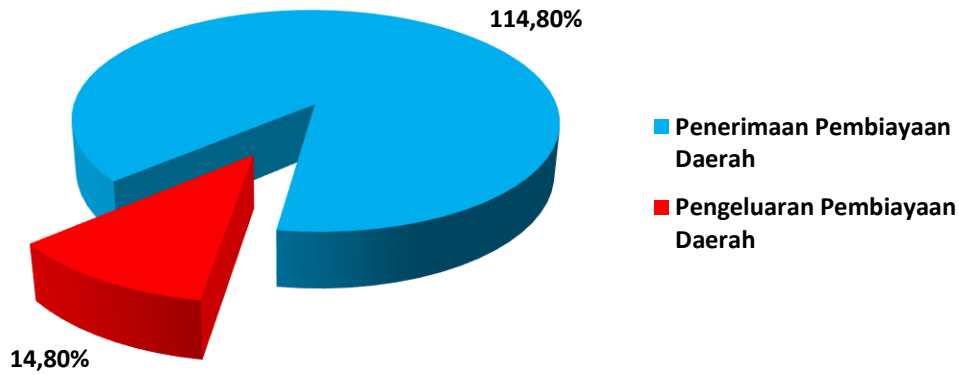


III. PEMBIAYAAN

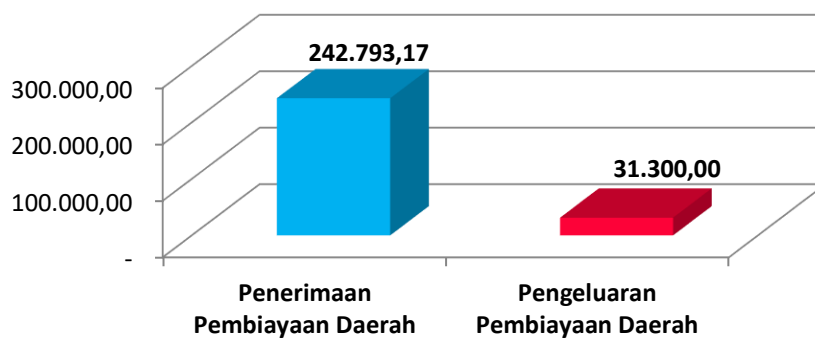
Dari seluruh perhitungan antara Pendapatan dan Belanja diperoleh *Defisit* sebesar Rp.211.493.170.198 Defisit tersebut ditutupi dari Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 242.793.170.198
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 31.300.000.000</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 211.493.170.198

Gambar 11.a. Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023



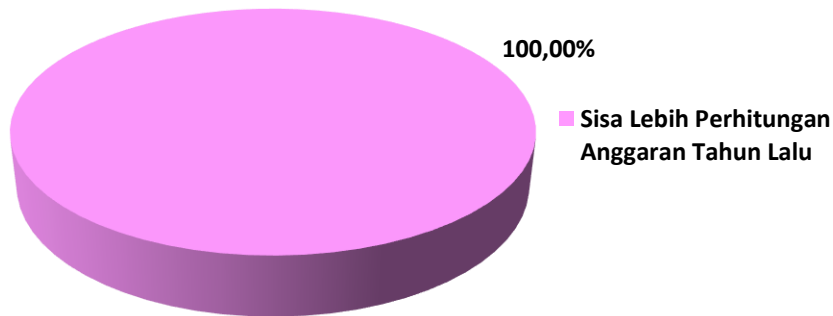
Gambar 11.b. Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 (Dalam jutaan Rupiah)



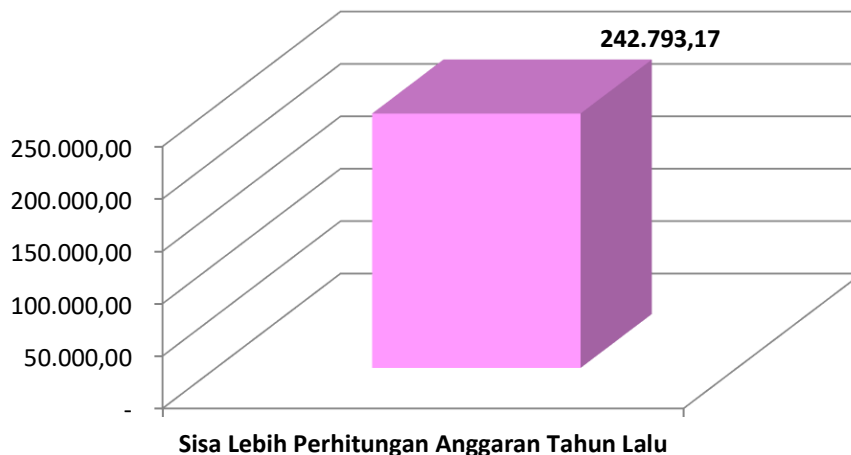
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.242.793.170.198 berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 242.793.170.198.

Gambar 13.a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023



Gambar 11.b. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Dalam jutaan Rupiah)

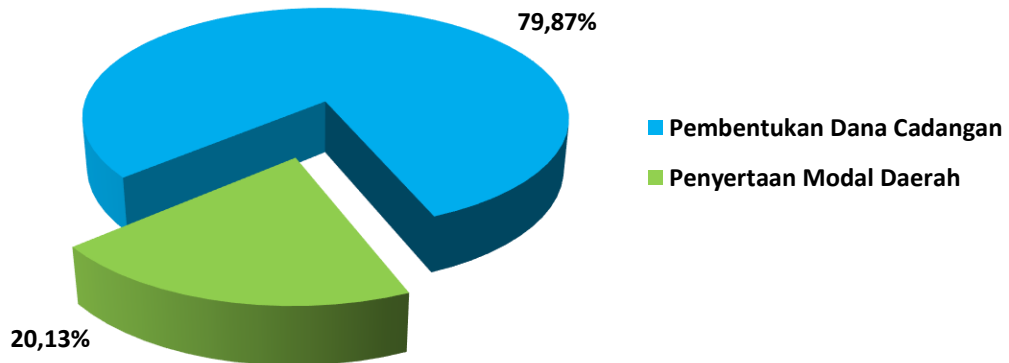


b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

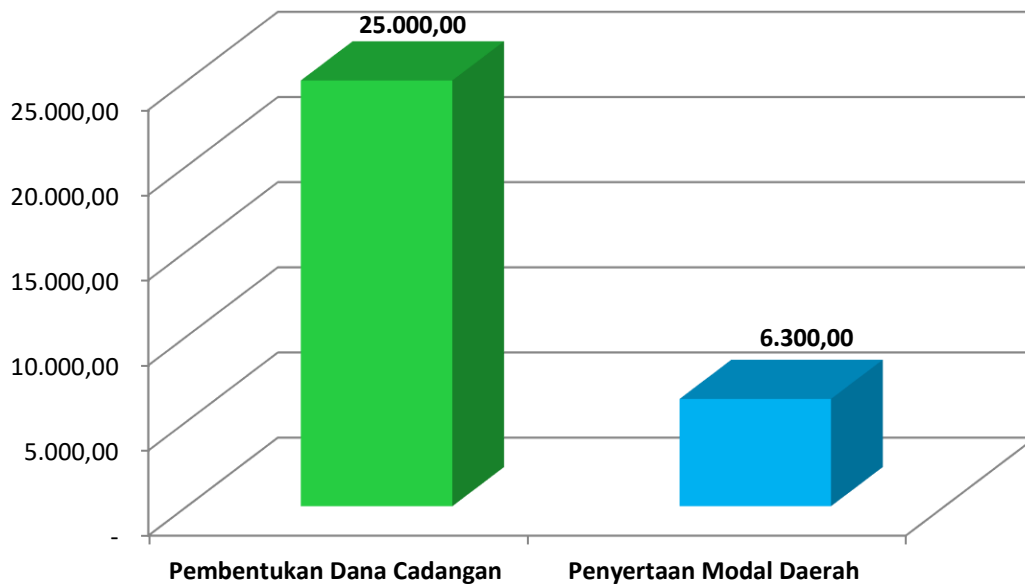
Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.31.300.000.000 berupa :

1. Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.25.000.000.000
2. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.6.300.000.000

Gambar 13.a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023



Gambar 11.b. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Dalam jutaan Rupiah)



**RINGKASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 dikelompokkan berdasarkan urusan-urusan dan dalam Kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer dan dirinci dalam program-program prioritas pada masing-masing OPD sebagai berikut :

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 759.415.828.826,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Pengembangan Kurikulum;
4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
6. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra.

1.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 480.835.949.564,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

1.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 162.440.208.154,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
7. Program Pengembangan Permukiman;
8. Program Penataan Bangunan Gedung;
9. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
10. Program Penyelenggaraan Jalan;
11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

1.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 4.186.676.782,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman melalui :

1. Program Kawasan Permukiman;
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).

1.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 16.912.856.017,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
3. Program Penanggulangan Bencana;
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Kebakaran.

1.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 35.701.599.990,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Sosial melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 1.949.524.937,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja melalui :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
3. Program Hubungan Industrial.

2.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 885.072.672,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
4. Program Perlindungan Khusus Anak.

2.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 334.677.879,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pangan melalui :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan Keamanan Pangan.

2.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 212.333.400,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan melalui :

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
3. Program Pengelolaan Tanah Kosong;
4. Program Penatagunaan Tanah.

2.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 26.394.736.186,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
10. Program Pengelolaan Persampahan.

2.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 10.617.470.654,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

2.7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 14.918.938.354,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

2.8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 12.833.659.077,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melalui :

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

2.9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 40.794.812.741,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
3. Program Pengelolaan Pelayaran;
4. Program Pengelolaan Penerbangan.

2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 17.653.309.049,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 16.472.387.027,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
7. Program Pengembangan UMKM.

2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 9.438.783.852,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Anggaran belanja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 6.593.899.117,00** dengan Program Prioritas Urusan Kepemudaan dan Olah Raga melalui :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 101.768.970,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Statistik melalui :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 76.860.580,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Persandian melalui :

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 9.082.144.420,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Kebudayaan;
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
4. Program Pembinaan Sejarah;
5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;
6. Program Pengelolaan Permuseuman.

2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 4.764.640.893,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.

2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 178.542.790,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan melalui :

1. Program Pengelolaan Arsip;

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 15.662.640.372,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

3.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 2.796.373.590,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata melalui :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pemasaran Pariwisata;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

3.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 110.444.070.692,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
6. Program Perizinan Usaha Pertanian;
7. Program Penyuluhan Pertanian.

3.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 1.676.015.023,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan melalui :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
3. Program Pengembangan Ekspor;
4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

3.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 4.790.708.122,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian melalui:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.

3.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 14.999.800,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi melalui:

1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.1. SEKRETARIAT DAERAH

Anggaran belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 52.458.168.369,00** dengan Program Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan.

4.2. SEKRETARIAT DPRD

Anggaran Belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD sebesar **Rp.63.404.036.572,00** dengan Program Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.1. PERENCANAAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 9.782.499.495,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

5.2. KEUANGAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 624.648.385.838,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

5.3. KEPEGAWAIAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 11.512.832.079,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah.

5.4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 961.784.000,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5.5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 934.182.944,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut :

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.1. INSPEKTORAT DAERAH

Anggaran belanja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 15.557.250.538,00** dengan Program Prioritas Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.1. KECAMATAN

Anggaran belanja Unsur Kewilayahan Kecamatan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 74.193.033.747,00** dengan Program Prioritas Unsur Kewilayahan Kecamatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

8. PEMERINTAHAN UMUM

8.1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Anggaran belanja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar **Rp. 10.502.793.780,00** dengan Program Prioritas Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Sehingga nampak dalam ringkasan Belanja Kabupaten Sumenep menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA				
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,270,818,357,112	188,674,762,221	0	0	1,459,493,119,333
1 01	Urusan pemerintahan bidang pendidikan	714,220,182,868	45,195,645,958	0	0	759,415,828,826
1 02	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	446,912,552,145	33,923,397,419	0	0	480,835,949,564
1 03	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	53,262,715,833	109,177,492,321	0	0	162,440,208,154
1 04	Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	4,186,676,782	0	0	0	4,186,676,782
1 05	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	16,637,266,194	275,589,823	0	0	16,912,856,017
1 06	Urusan pemerintahan bidang sosial	35,598,963,290	102,636,700	0	0	35,701,599,990
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	159,353,873,948	13,949,688,650	0	0	173,303,562,598
2 07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	1,949,427,437	97,500	0	0	1,949,524,937
2 08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	883,291,872	1,780,800	0	0	885,072,672
2 09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	334,677,879	0	0	0	334,677,879
2 10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	212,333,400	0	0	0	212,333,400
2 11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	21,419,112,700	4,975,623,486	0	0	26,394,736,186
2 12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9,136,192,764	1,481,277,890	0	0	10,617,470,654
2 13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14,155,554,731	763,383,623	0	0	14,918,938,354
2 14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	11,078,679,812	1,754,979,265	0	0	12,833,659,077
2 15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	37,323,198,003	3,471,614,738	0	0	40,794,812,741
2 16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	16,996,067,760	657,241,289	0	0	17,653,309,049
2 17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	16,216,877,584	255,509,443	0	0	16,472,387,027
2 18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	9,438,783,852	0	0	0	9,438,783,852
2 19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	6,548,354,071	45,545,046	0	0	6,593,899,117
2 20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	69,419,907	32,349,063	0	0	101,768,970
2 21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	76,860,580	0	0	0	76,860,580
2 22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	9,015,688,124	66,456,296	0	0	9,082,144,420
2 23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	4,320,810,682	443,830,211	0	0	4,764,640,893
2 24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	178,542,790	0	0	0	178,542,790

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA				
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	125,113,973,778	10,270,833,821	0	0	135,384,807,599
3	25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	12,860,603,743	2,802,036,629	0	0	15,662,640,372
3	26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	2,763,945,590	32,428,000	0	0	2,796,373,590
3	27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	107,018,152,247	3,425,918,445	0	0	110,444,070,692
3	30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	1,271,458,475	404,556,548	0	0	1,676,015,023
3	31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1,184,813,923	3,605,894,199	0	0	4,790,708,122
3	32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	14,999,800	0	0	0	14,999,800
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	115,314,328,299	547,876,642	0	0	115,862,204,941
4	01 Sekretariat Daerah	52,177,912,514	280,255,855	0	0	52,458,168,369
4	02 Sekretariat DPRD	63,136,415,785	267,620,787	0	0	63,404,036,572
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	90,342,696,645	584,639,281	15,000,000,000	541,912,348,430	647,839,684,356
5	01 Perencanaan	9,715,279,160	67,220,335	0	0	9,782,499,495
5	02 Keuangan	67,350,100,620	385,936,788	15,000,000,000	541,912,348,430	624,648,385,838
5	03 Kepegawaian	11,381,349,921	131,482,158	0	0	11,512,832,079
5	04 Pendidikan dan Pelatihan	961,784,000	0	0	0	961,784,000
5	05 Penelitian Dan Pengembangan	934,182,944	0	0	0	934,182,944
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	15,165,498,938	391,751,600	0	0	15,557,250,538
6	01 Inspektorat Daerah	15,165,498,938	391,751,600	0	0	15,557,250,538
7	UNSUR KEWILAYAHAN	72,390,286,012	1,802,747,735	0	0	74,193,033,747
7	01 Kecamatan	72,390,286,012	1,802,747,735	0	0	74,193,033,747
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	10,454,415,780	48,378,000	0	0	10,502,793,780
8	01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	10,454,415,780	48,378,000	0	0	10,502,793,780
TOTAL		1,858,953,430,512	216,270,677,950	15,000,000,000	541,912,348,430	2,632,136,456,892

KABUPATEN SUMENEP
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	243.711.344.026
4.1.01	Pajak Daerah	37.584.478.999
4.1.02	Retribusi Daerah	9.510.190.730
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.632.750.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	180.983.924.297
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.163.718.107.568
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.057.125.428.334
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.592.679.234
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.213.835.100
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.213.835.100
	Jumlah Pendapatan	2.420.643.286.694
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.858.953.430.512
5.1.01	Belanja Pegawai	1.059.569.280.053
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648.139.449.230
5.1.04	Belanja Subsidi	6.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	132.746.452.229
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.498.249.000
5.2	BELANJA MODAL	216.270.677.950
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.372.315.595
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.268.826.635
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.089.621.720
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.539.914.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	541.912.348.430
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.877.597.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	537.034.751.430
	Jumlah Belanja	2.632.136.456.892
	Total Surplus/(Defisit)	(211.493.170.198)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	242.793.170.198
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	242.793.170.198
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	242.793.170.198
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	31.300.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.300.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	31.300.000.000
	Pembiayaan Netto	211.493.170.198
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Sumenep

ACHMAD FAUZI